

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Anggito Albi & Setiawan Johan, Metodologi penelitian kualitatif (sukabumi:CV jejak,2018).
- Azhary Tahir Muhammad, Beberapa Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Islam. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2012).
- Cristine Kansil, Penganter Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta:rineka cipta,2011).
- Darumurti Djaya Krishna, Diskresi Kajian Teori Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing. 2016).
- Didjen PP. Kemenkumhan.go.id, UU Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara, Artikel Hukum Administrasi negara
- Hadi Apsari Ayu Gusti, Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang N0.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Jurnal ilmiah vol 39 No.1 (april 20jp17) Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Anggara Sahla, Hukum administrasi Negara, (Bandung: Pustaka setia, April 2018).
- HR Ridwan, Hukum administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers,2016).
- Iqbal Muhammad, Fiqih Siyasyah konstektualisasi doktrin politik islam, (Jakarta: Prenadamedia grup 2014).
- Marzuki Mahmud Peter, Penelitain Hukum. (Jakarta:predana media grup.2005).

Mubarak “Diskresi Hukum dan Kaitan dengan Ijtihad, (STAIN Syariah).

Rahmat Muhammad, Hukum Administrasi Negara Indonesia, (logoz publishing, jakarta 2014).

Subagyo Joko, Metode penelitian dalam teori dan praktek. Jakarta: PT. Rineka cipta.1994).

Sulaiman, Diskresi dan Penerapannya, Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Abdullah Ali, Teori dan Praktik Hukum Acara Pradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen, (Jakarta,Pranada Media Grup:2017).

Susiani Dina, Hukum Administrasi Negara, Pustaka Abadi (agustus 2019).

Taufiqurahman Mhd, Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan, Universitas Darma Agung Medan.

Utama Johan Yos, Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Wijaya Prasetya Kristina, Diskresi Hukum Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya;(oktober 2019).3m,1986).

Yulikhsan Eri, *keputusan diskresi dalam dinamika pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*, (deepublish, Yogyakarta: Juli 2016.

JURNAL / INTERNET

Ansori Lutfi, Diskresi dan Pertanggung Jawaban Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 juli 2015.

Aristoni, Tinjauan Hukum Diskresi dalam Konsep Welfare state Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam, Jurnal Penelitian, Vol 8, No.2, Agustus 2014, (Kudus Jawa Tengah).

<http://M.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b538f5ff35f5/arti--tujuan--lingkup-dan-contoh-diskresi>.

<https://jdih.makassar.go.id/sub-dokumentasi-dan-informasi-bagian-hukum-mengadakan-sosialisasi-undang-undang-nomor-30-tahun-2014-tentang-administrasi-pemerintahan-dalam-konteks-diskresi-hotel-best-western-04-september-2018>.

<https://media.neliti.com/media/publications/37050-ID-diskresi-hukum-dan-kaitannya-dengan-ijtihad.pdf>.

Jaelani Aziz Muhammad, Antinomi diskresi dalam bentuk freies ermesen untuk penyelenggaraan pemerintahan berwawasan pancasila, Jurnal jurisprudence vol.9.No. 1. 1990, (Fakultas Hukum universitas Sebelas Maret).

Muhizi Faiz Arfan, Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi, Jurnal Rechts vinding, volum 1, nomor 1 , Januari-April 2012.

Mustamu Juliata, Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan, Jurnal sesi vol. 17 no.2 bulan April-Juni 2011.

Solechan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, Jurnal. Vol 2 Issue 3, Agustus 2019 (Fakultas Hukum Unuversitas Diponegoro).

UNDANG-UNDANG

Elisabet Regita, <https://elisecience.wordpress.com/2016/10/12/dasar-dasar-hukum-administrasi-negara>.

Pasal 27 ayat (2) huruf d Undang-Undang No.30 Tahun 2014, menyatakan Bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan diskresi.

Republik Indoneisa, Undang-undang No, 30 tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan bab VI, pasal 22 ayat (2).

Yasin Muhammad dkk (ed.) Antasi Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.